

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar isi	vi
Intisari	viii
 Bab. I Pendahuluan	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Permasalahan	7
2.1. Bagaimana Korelasi antara Penunjukan Langsung	7
2.2. Bagaimana Implikasi pelaksanaan Penunjukan Langsung	8
3. Keaslian Penelitian	8
4. Kegunaan Penelitian	8
4.1. Kegunaan secara Prakris	8
4.2. Kegunaan secara Teoritis	9
5. Tujuan Penelitian	10
5.1. Korelasi antara Penunjukan Langsung	10
5.2. Peranan Pengadilan TIPIKOR	10
 Bab. II Tinjauan Pustaka	
1. Pengertian korelasi,penunjukan langsung dan tindak pidana korupsi	11
1.1 Pengertian Korelasi	11
1.2. Pengertian Penunjukan Langsung	11
1.3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	11
2. Identifikasi Penyimpangan	12
2.1. Perencanaan Pengadaan Barang /Jasa	13
2.2. Proses Pelelangan	13
2.3. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	15
2.4. Pembayaran dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa	16
3. Hubungan indikator penyimpangan dengan Keppres pengadaan barang/jasa	16
3.1. Etika dan Penetapan HPS	17
3.2. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	19
3.3. Pembuatan Berita Acara Serah Terima	22
3.4. Cara-cara Pembayaran atas Prestasi Kerja	23
3.5. Adanya Penerimaan Uang Komisi	23
4. Hubungan indikator penyimpangan dengan tindak pidana Korupsi	23

4.1. Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999	24
4.2. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999	30
5. Hubungan putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan upaya pemerintah membersihkan KKN	35
5.1. Teori deterensi	36
5.2. Penentuan hukuman	36
5.3. Teori Retributivisme	36
Bab. III Cara Penelitian	
1. Bahan penelitian	43
1.1. Bahan-bahan/data-data hukum Primer	43
1.2. Bahan-bahan/data-data hukum Sekunder	45
2. Alat Penelitian	45
3. Jalannya Penelitian	46
3.1. Data	46
3.2. Lokasi Penelitian	46
3.3. Populasi	46
3.4. Metode Pengambilan Sampel	46
3.5. Nara Sumber	47
4. Analisa Data	47
5. Kesulitan yang timbul dan cara mengatasinya	48
Bab. IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
1. Hasil Penelitian	49
Aspek KKN korelasinya dengan penunjukan langsung....	49
Aspek Kerugian Negara	49
Aspek Hukum	50
2. Pembahasan	50
2.1. Aspek KKN korelasinya dengan penunjukan langsung...	50
2.2. Aspek Kerugian Negara	51
2.3. Aspek Hukum	52
Bab. V Kesimpulan	
1. Kesimpulan	54
1.1. Korelasi penggunaan metode penunjukan langsung dengan tindak pidana korupsi	54
1.2. Implikasi penggunaan metode penunjukan langsung dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN	55
2. Saran	56
Daftar Pustaka	60